

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA****(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2022/Khusus - Awal Menjabat)**

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)
UNIT KERJA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NYOMAN ADHI SURYADNYANA
2. Jabatan : ANGGOTA VI BPK RI
3. NHK : 138964

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.708.355.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 181 m2/170 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.708.355.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 166.500.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2009, HASIL
SENDIRI Rp. 130.000.000
2. MOTOR, HONDA NSR SEPEDA MOTOR Tahun 2001, HASIL
SENDIRI Rp. 9.500.000
3. LAINNYA, SEPEDA 2 POLYGON, 1 PASIFIC DAN 1 DAHON 2
SEPEDA MTB DAN 2 SEPEDA LIPAT Tahun 2020, HASIL
SENDIRI Rp. 27.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 2.462.500.011

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.865.783.943

F. HARTA LAINNYA Rp. 483.032.706

Sub Total Rp. 7.686.171.660

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 7.686.171.660

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi



pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.